

# PERAN KOMUNIKASI DALAM MODERNISASI PERTANIAN BERBASIS KOPERASI

Parlaungan Adil Rangkuti<sup>1</sup>

## ABSTRACT

*Modern agricultural development is largely determined by the acceleration of productivity improvement, quality and value-added production to agribusiness and agro-industry approach. Since the development of the green revolution, agricultural technology and agricultural business management in the country has developed rapidly, especially in increasing the production of various food commodities through the development program planned by the government. To encourage increased capacity of farmers towards the realization of a more modern agriculture the government to provide top down approach guidance through the extension program and the spread of agricultural extension field workers (PPL). The process of technological innovation and adoption of agricultural business management has occurred through the Village Unit Cooperatives (KUD), but it has an impact on the dependence of farmers to the government and adoption of technological innovation has decreased (stagnant). Independence and competitiveness of farmers through KUD has decreased, consequently increasing agricultural productivity also hampered and economic conditions of farmers highly dependent on government aid with very weak competitiveness. Entering the era of globalization with a very dynamic communication technologies development require a sustainable modern agriculture development model with agribusiness and agro-industry approach to farmer competitiveness based on strengthening farmer agricultural cooperative. Performance and capacity of agricultural cooperatives will be enhanced if there is a KUD arrangement and able to take advantage of the available information optimally. To build an independent and competitive agricultural cooperative, need to develop a specific leading commodity programs in its working areas as agribusiness development area (KPA) as the concept of OTOP (One Tambon One Product) which has been implemented in Thailand and Japan. The role of cooperative organizations communications with two-way communication model (convergence) can support the synergy of cooperation with other economic actors towards the realization of a more modern agriculture.*

*Key words: Agricultural development communication, sustainable modern agriculture, agricultural cooperatives, acompetitiveness of agricultural cooperatives, agribusiness and agro-industry system*

## PENDAHULUAN

Menurut Adjid (2001), pembangunan pertanian modern adalah suatu rangkaian panjang dari perubahan atau peningkatan kapasitas, kualitas, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja pertanian, disertai dengan penataan dan pengembangan lingkungan fisik dan sosialnya, sebagai manifestasi dari akumulasi dan aplikasi kemajuan teknologi dan kekayaan material serta organisasi dan manajemen. Mosher (1985) mengemukakan bahwa ada sepuluh faktor penentu dalam modernisasi pertanian yang meliputi lima syarat pokok dan lima syarat pelancar. Kelima syarat pokok tersebut meliputi: (1) adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, (2) teknologi yang senantiasa berkembang, (3) tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, (3) adanya perangsang produksi bagi petani, dan (5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu. Adapun syarat pelancar pembangunan pertanian meliputi: (1) pendidikan pembangunan, (2) kredit produksi, (3) kegiatan gotong royong petani, (4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian modern merupakan langkah strategis mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai paradigma baru, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan yang akan menjadi pendorong pertumbuhan sektor nonpertanian.

Sejak dikembangkannya gerakan revolusi hijau, pemanfaatan berbagai teknologi seperti teknologi kimia dan teknologi alat dan mesin pertanian (alsintan) telah terjadi peningkatan produktivitas pertanian yang sangat pesat. Namun disisi lain terjadi kerusakan lingkungan hidup dan tatanan kehidupan sosial di pedesaan. Proses adopsi inovasi teknologi bari di lingkungan petani telah terjadi berkat dukungan sistem komunikasi pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah. Oleh karena pendekatan pembangunan pertanian pada waktu itu sangat

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Institut Pertanian Bogor

memperhatikan persuasi dan propaganda, maka pemerintah mengacu kepada model komunikasi linier (satu arah) dan berbentuk vertikal dari atas ke bawah (top down). Sejak pasca swasembada pangan tahun 1984 terjadi kecenderungan melambatnya adopsi inovasi teknologi pertanian dalam peningkatan produksi, seperti terlihat dari gejala stagnasi atau pelandaian produktivitas berbagai produksi komoditas pertanian dan pendapatan serta kesejahteraan petani di pedesaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi teknologi antara lain: (1) teknis teknologinya, (2) karakteristik sasaran, (3) lingkungan dan (4) sumber informasi (Sahardi 2005).

Menurut Jahi (1988) bahwa setelah model komunikasi linier satu arah dianggap kurang sempurna, kini pandangan orang mulai mengarah pada komunikasi interaktif dua arah di antara partisipan. Modernisasi pertanian di masa depan sangat tergantung kepada manfaat optimal dari teknologi yang diperoleh oleh petani dan tidak merusak lingkungan. Teknologi pertanian harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global yakni berdaya saing dan ramah lingkungan. Akses petani dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber telah terbuka luas sehingga dalam waktu singkat akan menjadi bagian dari masyarakat informasi untuk memanfaatkannya bagi percepatan modernisasi pertanian. Paradigma pembangunan saat ini mengalami pergeseran, di mana pembangunan menekankan pada pemberdayaan (empowerment) yang dikenal dengan pembangunan manusia (people centered development), pembangunan berbasis sumber daya lokal (resource based development), dan pembangunan kelembagaan (institutional development).

Dalam hal ini peran komunikasi pembangunan dua arah (convergen) di pedesaan menjadi penting agar petani dapat memperoleh informasi dan menentukan teknologi pertanian yang tepat untuk digunakan petani dan manajemen usaha tani yang semakin maju. Sistem agribisnis dan agroindustri merupakan pendekatan pengembangan usahatani modern dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, nilai tambah dan daya saing petani. Berkaitan dengan program otonomi daerah yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, komunikasi pembangunan pertanian untuk percepatan kemandirian petani dan peningkatan daya saing menuju pertanian berkelanjutan yang modern, merupakan alternatif kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Pemahaman keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan karakteristiknya yang khas pada setiap daerah menjadi landasan pokok untuk membangun pertanian modern di masa depan. Proses adopsi inovasi teknologi dan jaringan komunikasi petani yang ditemukan di daerah melalui perkuatan koperasi pertanian akan sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi pembangunan.

Pembangunan pertanian modern secara efisien dan efektif dengan pendekatan agribisnis dan kelestarian lingkungan hidup berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan merupakan alternatif pilihan untuk percepatan kesejahteraan petani. Penataan dan pengembangan model Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat perlu didorong agar dapat melakukan kerjasama sinergi dengan pilar kekuatan lainnya yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Soekartawi (2005) menyatakan bahwa untuk mendorong percepatan modernisasi pertanian yang berkelanjutan dengan penerapan teknologi tepat guna dan mendorong meningkatnya daya saing dan kesejahteraan petani diperlukan dukungan komunikasi pembangunan pertanian yang efektif. Komunikasi pertanian mengandung beberapa aspek penting berkaitan dengan proses pengambilan keputusan antara lain: motivasi dalam pemecahan masalah, bagaimana menyelesaikan tiap masalah untuk mencapai tujuan, apakah ada kesempatan untuk mencapai tujuan itu, dimana dan kapan waktu yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut dan perubahan situasi lingkungan.

### **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah bagaimana pola komunikasi yang efektif agar proses komunikasi dalam pemanfaatan informasi yang tersedia dapat secara optimal

mendorong percepatan modernisasi pertanian berbasis koperasi kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di pedesaan dapat berlangsung efektif.

## PEMBAHASAN

### Paradigma Pembangunan Pertanian

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Steers (1985) mengemukakan bahwa pembangunan sebagai upaya membangkitkan masyarakat di Negara-negara sedang berkembang mengatasi masalah kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, pengangguran dan ketidakadilan. Rogers (1976) mengartikan pembangunan sebagai proses-proses yang terjadi pada tingkat sistem sosial dan modernisasi yang terjadi pada tingkat individu termasuk istilah difusi inovasi, adopsi inovasi, akulturasi, belajar atau sosialisasi. Dissayanake (1981) menggambarkan bahwa pembangunan ialah proses perubahan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan kultural tempat mereka berada dan berusaha, serta melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah: *Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*. Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi yang mencakup: (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, (2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing, (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, (4) mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu, (5) mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, (6) mewujudkan Indonesia asri dan lestari, (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (8) mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional (Umar 2007). Terkait dengan upaya mewujudkan Indonesia asri dan lestari yakni untuk memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi. Di samping itu meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberi keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

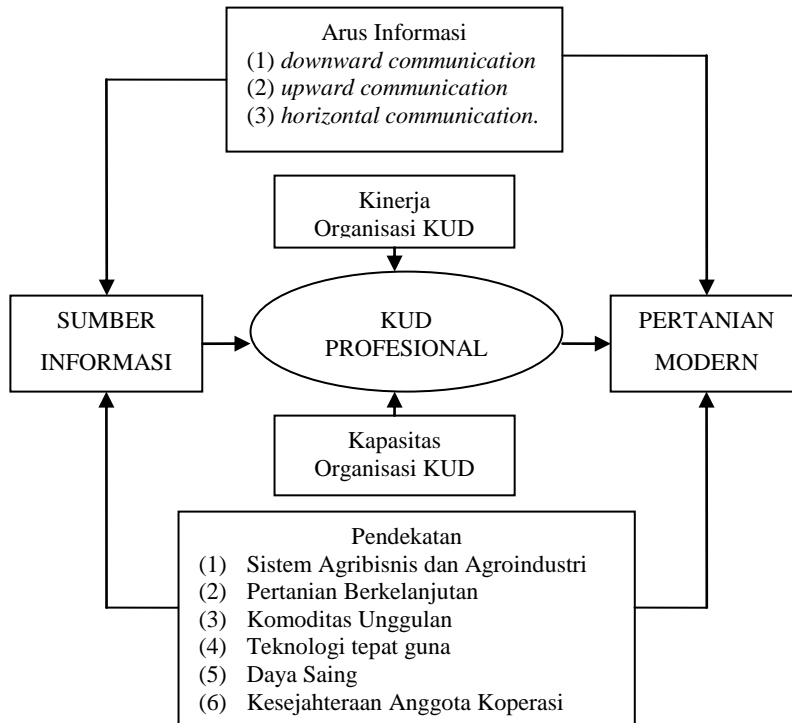
Untuk percepatan modernisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi perlu paradigma baru yang dikaitkan dengan pemanfaatan informasi melalui komunikasi pembangunan pertanian berbasis koperasi yang profesional berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian. Modernisasi pertanian harus mampu menghindari kerusakan-kerusakan struktur tanah, polusi air, pencemaran lingkungan akibat penggunaan pupuk dan pestisida serta penggunaan alsintan yang tidak ramah lingkungan. Pertanian lestari menjadi pilihan utama yang telah muncul sebagai gerakan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) pada awal 1990-an. Munculnya gerakan ini semula dipelopori oleh para pecinta lingkungan yang khawatir terjadi kerusakan alam secara terus-menerus akibat penggunaan bahan-bahan kimia, juga punahnya berbagai keanekaragaman hayati di muka bumi. Gerakan ini mendorong perubahan dalam praktek-praktek usaha tani. Penggunaan bahan-bahan kimia (pupuk dan pestisida) dikurangi, kembali ke cara-cara tradisional yang menghargai potensi lokal, menempatkan petani sebagai subyek

pertanian, mengelola usaha tani sesuai dengan budaya dan lingkungan setempat, serta mengupayakan perdagangan yang adil (*fair trade*).

Pendekatan dan strategi yang dikembangkan dalam model pertanian berkelanjutan ini dilakukan dengan cara mendorong tumbuhnya sumber-sumber pendapatan keluarga petani di pedesaan dengan pendekatan agribisnis dan agroindustri. Strategi agribisnis yang telah dikembangkan mencakup dua aspek yakni kegiatan pada *on farm* (di lahan pertanian) dan kegiatan pada *off farm* (di luar lahan pertanian). Model *on farm* yang dikembangkan tidak harus kembali pada model tradisional yang sudah ada sejak dulu, namun perlu disesuaikan dengan situasi lingkungan yang sudah berubah, juga kebutuhan (pangan dan ekonomi) yang semakin besar. Prinsip pengelolaan pertanian berkelanjutan adalah multikultur, menghargai keanekaragaman hayati, menghargai kearifan lokal, memanfaatkan bahan-bahan lokal, tidak bergantung bahan luar, tidak mengeksploitasi alam serta sesuai budaya dan pilihan serta kemampuan petani. Prinsip-prinsip tersebut menumbuhkan beragam model pertanian berkelanjutan di berbagai belahan dunia.

Petani kecil yang seringkali mempunyai keterbatasan dalam mengakses sarana dan prasarana produksi pertanian, melalui pertanian lestari mempunyai peluang yang luas dalam membangun usaha pertaniannya. Kepercayaan petani kembali tumbuh karena bisa membuat keputusan sendiri terhadap usaha taninya serta mampu membuat benih pupuk dan pestisida sendiri, mempunyai organisasi serta jaringan antar petani. Gerakan pertanian berkelanjutan yang terjadi di hampir setiap negara, terutama negara-negara Amerika, Eropa dan Asia selama 10 tahun terakhir ini menunjukkan perubahan-perubahan yang menarik. Perubahan yang muncul antara lain: (1) Gerakan konsumen hijau yakni perubahan kesadaran dan pola konsumen terhadap produk pangan yang ramah lingkungan (*organik*) meningkat dan (2) Gerakan konsumen ini sangat mendukung upaya penyelamatan lingkungan dan menekan perusahaan pertanian dalam memproduksi barang dan jasa agar menggunakan etika kemanusiaan dan lingkungan. IFOAM adalah salah satu lembaga *independent* yang diakui bisa memberikan sertifikasi organik.

Dengan kondisi petani saat ini yang masih serba lemah, baik penguasaan lahan, modal maupun teknologi maka diperlukan *multi approach* yakni pendekatan modernisasi, kemandirian dan partisipatif. Untuk maksud tersebut peran koperasi pertanian yang semakin profesional merupakan kebutuhan petani sehingga mempunyai daya saing dan kemampuan meningkatkan nilai tambah bagi petani. Untuk percepatan pembangunan koperasi pertanian perlu dilakukan penataan KUD yang sudah ada agar semakin profesional dengan kinerja dan kapasitas yang semakin meningkat dengan pemanfaatan informasi yang tersedia secara optimal. Dengan demikian peran komunikasi pembangunan pertanian dan komunikasi organisasi koperasi dengan pola dua arah dengan pendekatan sistem agribisnis dan agroindustri, pertanian berkelanjutan, komoditas unggulan, teknologi tepat guna, daya saing serta kesejahteraan anggota semakin penting. Bagan paradigma modernisasi pertanian berbasis koperasi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Paradigma modernisasi pertanian berbasis koperasi  
**Komunikasi Pembangunan**

Konsep pembangunan pertanian semakin berkembang menuju pertanian modern seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam bidang teknologi dan manajemen pertanian yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat. Sejarah perekonomian dunia telah menunjukkan bahwa peran pertanian semakin penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan nasionalnya. Upaya pemberdayaan petani dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuannya agar mempunyai kemandirian dan daya saing dengan posisi tawar yang seimbang melalui sistem kemitraan usaha. Perkembangan globalisasi perdagangan yang cepat memberi dampak terhadap peran komunikasi dalam pembangunan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi yang berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dan terjadi saling pengertian, pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Efek komunikasi adalah perubahan pada perilaku individu dan dapat berdampak pada lingkungan individu. Menurut Rakhmat (2007) mengemukakan bahwa efek komunikasi adalah adanya perubahan yang terjadi pada diri khalayak yakni perubahan kognitif, afektif dan *behavioral*. Bila komunikasi terus menerus berlangsung akan terjadi interaksi yaitu saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan yang lain. Secara umum komunikasi mempunyai fungsi untuk menyampaikan suatu informasi dalam sistem sosial terkait dengan pendidikan, hiburan dan mempengaruhi perilaku. Selanjutnya Middleton (1975) diacu dalam Jahi (1988), mengungkapkan bahwa terdapat empat pendekatan komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan perilaku khalayak sasaran yakni menyampaikan informasi, instruksi, persuasi dan dialog.

Pada awalnya komunikasi pada umumnya dianggap sebagai suatu fungsi linear, di mana seseorang mengkomunikasikan pesan-pesannya melalui sebuah saluran kepada seorang penerima yang kemudian memberikan umpan balik kepada pengirim tersebut. Model komunikasi seperti ini dikenal sebagai teori peluru atau djarum suntik. Dalam model ini komunikator menggunakan media

massa untuk menembaki atau menyuntik khalayak dengan pesan-pesan persuasive yang tidak dapat mereka tahan. Proses seperti ini dinamakan proses satu arah yakni dari komunikator kepada komunikan dan pada umumnya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat secara hierarkhis ke bawah. Model komunikasi satu arah dikembangkan oleh negara-negara dunia ketiga yang menggunakan teori modernisasi dalam melaksanakan pembangunannya. Komunikasi telah berperan untuk membantu mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, khususnya peralihan dari kebiasaan-kebiasaan yang menghambat pembangunan ke arah sikap baru yang tangap terhadap pembaharuan. Arus komunikasi satu arah dari badan-badan pembangunan pemerintah kepada masyarakat sangat mencolok. Media massa dapat secara cepat menjangkau khalayak luas dengan pesan-pesan yang informatif mengenai berbagai hal tentang pembangunan (Muhammad 2004).

Dalam komunikasi akan terjadi suatu proses yang memungkinkan komponen-komponen suatu sistem sosial memperoleh dan bertukar informasi yang dibutuhkan dengan pihak lain. Sistem sosial tersebut memerlukan informasi untuk menyesuaikan diri dan menjaga keseimbangan dengan lingkungannya untuk berubah setiap saat. Penyesuaian diri sistem sosial tersebut dengan lingkungannya akan mengalami perubahan dan perubahan-perubahan tersebut dapat diartikan sebagai pembangunan. Menurut Rogers (1976) dalam perkembangannya istilah pembangunan banyak digunakan terkait dengan upaya melakukan perubahan sosial ekonomi. Kepincangan sosial ekonomi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, mengalihkan pemikiran para pakar untuk melahirkan konsep pembangunan yang lebih memperhatikan kemajuan sosial, persamaan dan kebebasan. Adanya pergeseran ini menimbulkan pengertian pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat berpartisipasi untuk mendapatkan kemajuan, baik secara sosial maupun material. Dalam hal ini termasuk pemerataan, kebebasan dan berbagai kualitas lain yang diinginkan agar menjadi lebih baik bagi mayoritas warga masyarakat dalam suatu lingkungan hidup yang lebih baik. Berarti konsep pembangunan telah bertambah luas dan menjadikannya jauh lebih fleksibel dan sekaligus memiliki implikasi yang lebih manusiawi. Seiring dengan itu konsep paradigma pembangunan mengisyaratkan bahwa peranan komunikasi dalam pembangunan semakin penting.

Teori pembangunan sebagai pola pikir yang berfungsi mengupas dan memecahkan persoalan-persoalan pembangunan, muncul bersamaan pada saat para pakar mencoba membahas pembangunan sekitar tahun 40an hingga tahun 60an, di mana saat itu banyak negara-negara yang baru merdeka. Berbagai tantangan dihadapi oleh negara-negara baru tersebut, terutama keterbelakangan dibidang ekonomi. Usaha untuk mengejar ketertinggalan tersebut ditempuh melalui pembangunan. Sejak itu teori pembangunan mulai digunakan sebagai resep bagi Negara dunia ketiga yang padat penduduk untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakatnya. Konsep pembangunan memiliki banyak teori yang melatarbelakanginya seperti teori modernisasi, teori ketergantungan dan keterbelakangan serta teori penyadaran (Gonzales diacu dalam Jahi 1988). Teori modernisasi melahirkan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Sedangkan teori ketergantungan dan keterbelakangan berkembang akibat dari proses eksploitasi dan ekspansi ekonomi dari perusahaan multinasional dari Negara-negara maju ke Negara-negara dunia ketiga atau Negara-negara berkembang. Teori penyadaran timbul belajar dari memahami kontradiksi sosial, politik dan serta mengambil tindakan untuk menghindari unsur-unsur yang menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Menurut Freire (1984) teori penyadaran merupakan solusi terhadap keterbelakangan yang banyak dialami Negara-negara berkembang agar mampu mandiri. Teori penyadaran telah mengilhami lahirnya model pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), yang memberikan peran pada warga masyarakat, bukan hanya sebagai subyek melainkan sebagai aktor yang menentukan tujuan-tujuannya sendiri, menguasai sumber daya yang

diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengarahkan proses-proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri (Korten 1983). Proses penyadaran kepada masyarakat tidak dapat terlepas dari berinteraksinya secara aktif dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Untuk dapat berinteraksi memerlukan komunikasi sebagai suatu proses di mana partisipan menciptakan dan membagi informasi dengan yang lain sebagai usaha untuk mencapai *mutual understanding* (pengertian bersama). Menurut Rogers dan Kincaid (1981) model komunikasi yang sesuai dengan teori penyadaran ini adalah model konvergensi sebagai proses transaksi diantara partisipan artinya ada proses dialogis yang terjadi sehingga terjadi *mutual understanding*.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa teori komunikasi dengan teori pembangunan mempunyai hubungan yang erat. Kontribusi teori penyadaran telah melahirkan model komunikasi interaktif yakni pendekatan komunikasi dua arah. Setiap partisipan memberikan kontribusi pada proses komunikasi dalam derajat yang setara. Inisiatif lokal diberikan penilaian yang tinggi dan konsep partisipatif menjadi fokus sentral dalam pembangunan. Dalam hubungan ini Rogers (1976) mengemukakan bahwa pembangunan diri (self development) merupakan konsep komunikasi pembangunan yang bersifat partisipatif. Pembangunan diri memberikan peranan yang amat berbeda kepada komunikasi dibandingkan pada pendekatan atas-bawah. Teori penyadaran lebih menekankan pada pendidikan dan pembebasan seseorang. Agar proses penyadaran dan pendidikan tersebut berjalan lancar, maka pembangunan diharapkan tidak merupakan total usaha dari pemerintah kepada masyarakat umum, melainkan merupakan usaha interaksi bersama. Untuk itu komunikasi yang dibangun pada masa selanjutnya berupa komunikasi yang interaksional sebagaimana model komunikasi interaksional Schramm (Mulyana & Rakhmat 2001).

Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian di pedesaan, kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat harus dilihat oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi sebagai peluang besar dalam mempromosikan potensi-potensi investasi unggulan yang ada di lingkungan wilayahnya. Informasi teknologi dan pasar yang tersedia dan dapat diakses oleh petani dalam mengembangkan agribisnis unggulan tiap daerah sangatlah penting, oleh karena itu perlu dibangun jaringan komunikasi antara petani dengan pihak luar, baik pemerintah maupun pengusaha sebagai mitra di lapangan. Ada dua faktor strategis yang mendesak untuk dikembangkan yakni mendorong kembali peran koperasi petani sebagai organisasi ekonomi yang semakin mandiri dan berdaya saing serta membangun Pusat Informasi Agribisnis Komoditas Unggulan. Di era yang kompetitif dan ketat seperti sekarang ini, beragam terobosan-terobosan inovatif harus dilakukan Pemda untuk menjual potensi-potensi investasi di wilayahnya melalui sistem informasi pertanian sebagai entitas bisnis agar segala potensi investasi mampu dijual dengan kreativitas promosi yang inovatif.

### **Peran dan Kondisi Nyata Koperasi Pertanian**

Koperasi sebagai salah satu dasar pembangunan ekonomi Indonesia perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu usaha untuk meningkatkan peran koperasi pertanian adalah dengan memperkuat daya saing pasarnya. Dalam usaha pemulihan krisis ekonomi Indonesia dewasa ini, sesungguhnya koperasi mempunyai peluang (opportunity) untuk tampil lebih eksis. Keunggulan koperasi, khususnya KUD, dalam menopang perekonomian bangsa sangat besar meskipun masih dalam bentuk keunggulan komparatif. Sejumlah peraturan (seperti Keputusan Presiden No. 9 tahun 2001) menetapkan bahwa koperasi tidak lagi diberikan peran khusus, dan dengan demikian harus mampu bersaing dengan pasar dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan layanan mereka kepada anggotanya. Padahal, dibandingkan dengan daya saing pasar dari badan usaha lainnya, daya saing pasar koperasi di Indonesia memang secara umum masih rendah. Selain terkendala dalam mengembangkan partisipasi aktif anggota, koperasi juga kekurangan fasilitas dan kemampuan untuk menyediakan layanan untuk anggotanya.

Akibat rendahnya kemampuan KUD dan koperasi-koperasi pertanian lainnya untuk peningkatan daya saing pasar maka diperlukan suatu pola komunikasi dalam menyampaikan informasi untuk memenuhi kebutuhan KUD. Salah satu kunci pembangunan KUD ke depan adalah mendorong setiap KUD bersama anggotanya (petani) untuk memanfaatkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber secara cepat, tepat dan berdayaguna melalui pengembangan komunikasi pembangunan pertanian dan pedesaan khususnya komunikasi organisasi yang efektif. Peran komunikasi yang efektif bagi suatu organisasi KUD sangat penting karena menyangkut struktur hubungan manusia dan berbagai elemen organisasi KUD yang saling terkait dalam pertumbuhannya seperti: komunikasi kepemimpinan KUD, iklim komunikasi organisasi, komunikasi publik organisasi KUD, karakteristik anggota KUD, tingkat kepuasan komunikasi anggota terhadap pelayanan KUD dan sebagainya.

Peran pembinaan KUD melalui sistem penyuluhan dengan menggunakan tenaga PPL yang telah berkembang selama ini perlu ditingkatkan dengan mengefektifkan komunikasi organisasi KUD untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai koperasi pertanian yang semakin profesional. Sistem penyuluhan menunjukkan bahwa penyampaian informasi lebih banyak diberikan ke kontak tani (81,3%) dan sisanya ke petani (maju dan biasa), sedangkan aspirasi lebih banyak diberikan oleh kontak tani (56,3%) ke PPL. Proses penyampaian informasi dan aspirasi dari petani dalam proses adopsi inovasi, sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek lingkungan internal dan eksternal, baik melalui pendekatan kelembagaan maupun melalui pendekatan proses komunikasi (Soekartawi 2005).

Untuk membangun kembali peran koperasi sesuai dengan asas, tujuan dan prinsip-prinsip perkoperasian, diperlukan upaya penguatan organisasi melalui pengembangan model komunikasi organisasi KUD untuk pengembangan kapasitasnya sebagai organisasi ekonomi petani yang mandiri dan berdaya saing secara profesional. Dalam implementasi pola komunikasi tersebut, diperlukan suatu kajian untuk mengidentifikasi dan menilai kondisinya sendiri dengan mengandalkan partisipasi aktif anggotanya serta selanjutnya mengembangkan program-program yang didasarkan pada kemampuan yang dimiliki sesuai dengan yang dibutuhkan anggota-anggotanya. Untuk itu peran komunikasi organisasi yang telah terbentuk selama ini dengan berbagai pihak (stakeholders) yakni dengan pihak pemerintah selaku pembina KUD, pengusaha sebagai mitra usaha KUD, serta perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan (badan litbang) sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta LSM (Lembaga Sosial Kemasyarakatan) sebagai mitra perjuangan KUD perlu dikembangkan melalui suatu model komunikasi organisasi yang efektif.

Dari hasil studi perkuatan daya saing pasar koperasi (Sembiring *et al.* 2008) yang dilakukan di tiga kabupaten yakni Kabupaten Bogor, Karawang dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagai studi kasus menyimpulkan bahwa terjadi penurunan dari kinerja dan kapasitas KUD ditinjau dari aspek permodalan, pelayanan dan manfaat ekonomi bagi anggota. Di tengah pertumbuhan jumlah koperasi di Karawang sebesar 4.1 persen, ternyata jumlah KUD tidak mengalami pertumbuhan. Fakta lainnya adalah sebagian besar KUD di Sukabumi dikategorikan tidak aktif oleh Dinas Koperasi Sukabumi dan tidak ada yang memiliki klasifikasi A. Persentase KUD dari keseluruhan koperasi di Karawang dan Sukabumi sangat rendah yakni: 3.8 dan 2.6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa KUD nampaknya semakin tidak menarik bagi masyarakat. Dari hasil analisa dengan menggunakan analisa SWOT menunjukkan berbagai indikasi kondisi nyata KUD sebagai berikut:

### **Pernyataan SWOT**

#### **Kekuatan (Strength):**

- 1) Umumnya KUD masih melaksanakan RAT, rencana kerja dan pembagian SHU.
- 2) KUD memiliki unit usaha yang berkaitan dengan kebutuhan anggota.
- 3) Umumnya KUD masih memiliki pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.



- 4) Pengurus KUD masih memiliki motivasi untuk mengembangkan koperasi.
- 5) Masih terdapat KUD yang unit usahanya terkait dengan kegiatan ekonomi anggota-anggotanya yang dikelola oleh manajer.
- 6) Tingkat pendidikan pengelola sudah setingkat SLTA ke atas dan telah mengikuti berbagai pelatihan di bidang koperasi.
- 7) Tersedia sumber modal dari anggota yang berupa sumbangan pokok, wajib dan sukarela.
- 8) KUD memiliki aset berupa lahan, bangunan dan peralatan pertanian.

#### Kelemahan (Weaknesses):

- 1) Pada umumnya pengurus merangkap sebagai manajer.
- 2) Simpanan wajib tidak terlaksana dengan baik.
- 3) Terdapat KUD tidak mengadakan RAT sebagaimana mestinya.
- 4) Umumnya pengurus dalam pengembangan usaha KUD kurang memperhatikan kepentingan ekonomi anggota.
- 5) Keragaan (spesifikasi dan status) aset tidak dilaporkan secara jelas dalam laporan RAT.
- 6) Umumnya, pemanfaatan aset tidak mendukung kegiatan ekonomi dan kepentingan anggota.
- 7) Tidak ada perbedaan pelayanan antara anggota dan bukan anggota KUD.
- 8) Sistem basis data masih belum memadai dan dilaksanakan secara manual.
- 9) Belum ada sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi anggotanya.
- 10) Modal sosial belum dimanfaatkan secara optimum.

#### Peluang (Opportunity):

- 1) Masih terdapat potensi pengembangan kegiatan usaha tani meliputi produksi, pengolahan dan pemasaran.
- 2) Sebagai penyalur saprotan bersubsidi.
- 3) Terdapat mitra dalam menjalankan unit usahanya.
- 4) Tersedia dana pembinaan atau penguatan dari pemerintah berbasis kinerja yang baik.
- 5) Tersedia kredit komersil untuk peningkatan modal dari berbagai lembaga keuangan.
- 6) Pasar produksi dalam negeri masih terbuka luas.

#### Ancaman (Thread):

- 1) Ketidaksesuaian data kondisi KUD di dinas dengan dilapangan.
- 2) Berkembang pesatnya koperasi non KUD di pedesaan.
- 3) Era pasar bebas menuntut daya saing yang semakin tinggi.
- 4) Meningkatnya tuntutan akan kualitas produk yang lebih baik.
- 5) Kebijakan pemerintah yang meniadakan proteksi bagi usaha koperasi.
- 6) Peralihan profesi dari petani ke pekerjaan lain, sehingga sulit untuk membuat rencana kerja yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

#### **Beberapa solusi alternatif**

Selanjutnya, pernyataan SWOT tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa akar permasalahan antara lain adalah rendahnya pemahaman pengelola akan pentingnya sistem manajemen informasi dan rendahnya komitmen pengelola KUD dalam memanfaatkan sumber daya informasi. Beberapa alternatif solusi yang disarankan untuk penguatan daya saing KUD terkait dengan sistem informasi dan manajemen pemanfaatan informasi adalah: penguatan kapasitas kelembagaan koperasi, pengembangan sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan sosialisasi pendayagunaan kearifan lokal untuk pengembangan koperasi. Hasil kajian untuk mencari solusi alternatif terhadap akar masalah yang ditemui dilapangan dapat dilihat pada Tabel 1.

### Model Koperasi Koperasi Profesional

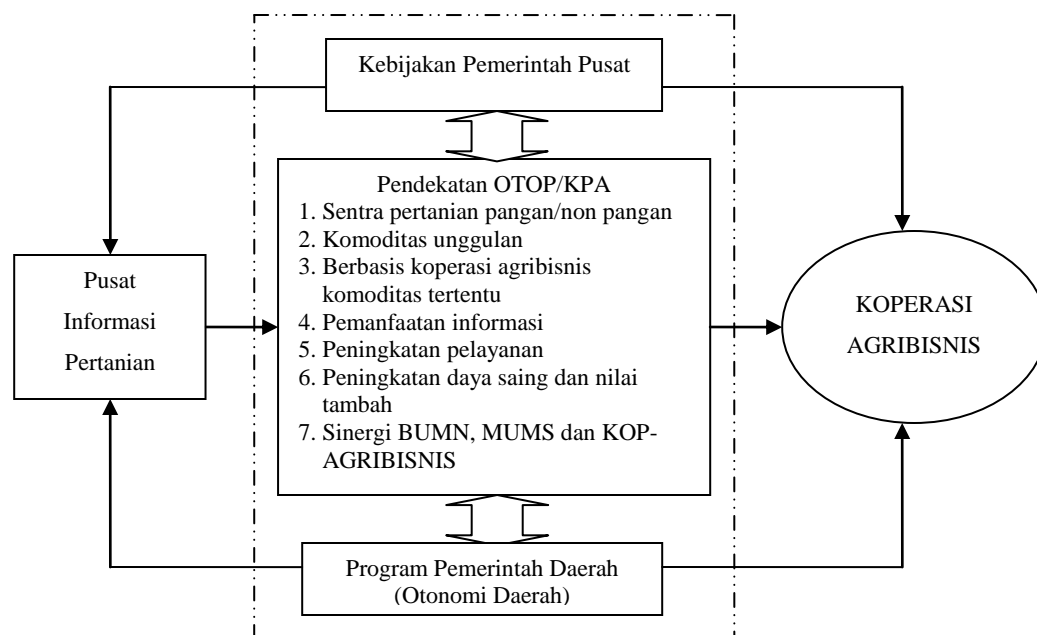
Berdasarkan analisa peran dan kondisi nyata perkoperasian pertanian dikaitkan dengan peran informasi sebagai kebutuhan petani menuju modernisasi pertanian diperlukan penataan KUD agar efektif dan efisien mewujudkan tujuan koperasi sebagai lembaga ekonomi petani di pedesaan. Menurut Sinaga *et al.* (2008) konsep OTOP (One Tambon One Product) yang telah diterapkan di Thailand dan Jepang yakni suatu gerakan satu desa satu komoditas unggulan sangat memungkinkan dapat dikembangkan di Indonesia. Program OTOP dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan penampilannya yang dilandasi oleh tiga filosofi yakni: 1) merupakan produk lokal yang mengglobal, 2) menghasilkan produk atas kreativitas dan dengan kemampuan sendiri dan 3) sekaligus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia. Di antar unsur yang mempengaruhi keberhasilan OTOP di Thailand terdapat beberapa unsur yang menonjol sebagai unsur kunci yakni: 1) kesesuaian potensi sumber daya alam, 2) sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan, etos kerja dan semangat kerja sama, 3) peluang pasar, 4) dukungan modal yang memadai, 5) pemanfaatan sumber daya teknologi informasi dan 6) dukungan dan koordinasi yang solid di antara institusi pemerintahan. Lebih lanjut Sinaga *et al.* (2008) mengemukakan bahwa disamping unsur-unsur kunci tersebut terdapat beberapa aspek sebagai penunjang keberhasilan OTOP yakni: 1) adanya konsistensi pembangunan secara bertahap, 2) keberpihakan kepada pengusaha ekonomi lemah dan menengah, 3) terjalinnya koordinasi yang baik di antara para pelaku pembangunan dan 4) adanya *patron client* yaitu Raja Thailand sebagai rujukan.

Tabel 1 Solusi alternatif terhadap akar masalah

No	Akar Masalah	Alternatif Solusi
1	Lemahnya pemahaman anggota akan hak dan kewajibannya	Peningkatan pemahaman anggota akan hak dan kewajibannya
2	Lemahnya kemampuan kewirausahaan pengelola	Peningkatan kemampuan kewirausahaan pengelola
3	Pengelolaan kios saprotan yang tidak efisien	Peningkatan kemampuan kewirausahaan pengelola kios saprotan
4	Lemahnya tata kelola KUD	Pengembangan system tata kelola KUD yang bersifat <i>good corporate governance</i>
5	Rendahnya pemahaman pengelola akan pentingnya manajemen sistem informasi	Peningkatan pemahaman pengelola akan pentingnya manajemen sistem informasi
6	Rendahnya komitmen pengelola dalam memanfaatkan sumber daya informasi	Peningkatan komitmen pengelola dalam memanfaatkan sumber daya informasi
7	Lemahnya pemahaman pengelola akan fungsi manajer	Peningkatan pemahaman pengurus akan pentingnya fungsi manajer
8	Sistem renumerasi terhadap manajer yang tidak atraktif	Mengembangkan sistem renumerasi terhadap manajer yang atraktif
9	Komitmen anggota terhadap pengembangan koperasi yang rendah	Peningkatan pemahaman anggota akan prinsip koperasi
	Kepercayaan anggota terhadap pengelola koperasi yang rendah	Pengelolaan koperasi yang transparan dan akuntabel
9	Penyelenggaraan RAT yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi	Peningkatan pemahaman pengelola dan anggota akan prinsip koperasi
10	Rendahnya komitmen pengelola dalam peningkatan kegiatan ekonomi anggota	Peningkatan pemahaman pengelola akan prinsip koperasi

11	Rendahnya pemahaman pengelola akan pentingnya kearifan lokal	Peningkatan pemahaman pengelola akan pentingnya kearifan lokal
12	Tata kelola KUD yang tidak sehat	Penyehatan tata kelola KUD
13	Rendahnya pengetahuan pengelola dalam pemanfaatan teknologi pertanian	Peningkatan pengetahuan pengelola dalam pemanfaatan teknologi pertanian
14	Kurangnya ketaatan pada prinsip-prinsip koperasi	Pengembangan system tata kelola KUD yang bersifat <i>good corporate governance</i>
15	Kurangnya ketaatan pada AD/ART koperasi	Pengembangan sistem tata kelola KUD yang bersifat <i>good corporate governance</i>

Replikasi program OTOP di Indonesia tampaknya dapat dikaitkan dengan program sentra bisnis yang saat ini telah dikembangkan pemerintah di berbagai daerah. Sentra sebagai pusat kegiatan ekonomi atau dapat dianalogkan sebagai kawasan pengembangan agribisnis (KPA) di mana terdapat komoditas unggulan tertentu yang memiliki prospek untuk dikembangkan di pedesaan. Membangun kemandirian dan daya saing dengan pendekatan KPA merupakan salah satu alternatif solusi dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Kementerian Negara Koperasi dan UKM ada tiga pilar yang difasilitasi pemerintah untuk mengembangkan sentra bisnis pertanian yakni: 1) pengembangan sentra UMKM menjadi kluster bisnis yang dinamis dengan pendekatan pengorganisasian dan pemberdayaan, 2) pengembangan BDS/LPB (Business Development Service/Lembaga Pelayanan Bisnis) untuk menumbuhkan lembaga usaha yang profesional, dan 3) pengembangan dana MAP (Modal Awal Pendanaan) bagi sentra bisnis melalui KSP/USP (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam) koperasi sebagai bagian dari program pengembangan sentra bisnis UMKM. Gerakan OTOP meskipun dilakukan dalam konteks gerakan masyarakat dalam pembangunan daerah yang menciptakan produk unggulan dan berdaya saing, memberi isyarat bagi pengembangan sentra bisnis bahwa ada hubungan antara sentra dan OTOP secara implementasi. Hubungan antara sentra dan program OTOP dalam pengembangan KUKM dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Hubungan sentra bisnis (OTOP/KPA) dengan koperasi agribisnis

Strategi yang perlu dilakukan untuk menerapkan OTOP/KPA adalah melakukan berbagai kebijakan yang mendorong bangkitnya koperasi pertanian sebagai lembaga ekonomi petani menuju pertanian modern yang berdaya saing dan memberi nilai tambah yang wajar bagi anggota dan sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai basis dari pembangunan perekonomian nasional adalah: 1) menentukan komoditas unggulan daerah (kawasan), 2) memperkuat fungsi koperasi dengan kinerja dan kapasitas yang semakin tinggi, 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang semakin profesional, 4) membangun peluang pasar di dalam negeri dan luar negeri, 5) memupuk modal dari internal koperasi dan sumber dana kredit dengan membangun koperasi pertanian 6) mempersiapkan teknologi tepat guna melalui riset unggulan dari lembaga riset dan perguruan tinggi dan 7) mengembangkan sistem kemitraan antar lembaga pelaku ekonomi secara sinergi yang saling menguntungkan.

Untuk mengefektifkan pemanfaatan informasi yang dibutuhkan petani melalui koperasi perlu dikembangkan Pusat Informasi Pertanian (PIP) spesifik terhadap komoditas unggulan. Teori komunikasi pembangunan pertanian dan komunikasi organisasi koperasi menjadi landasan utama yang perlu dikaji lebih lanjut agar mampu mengembangkan proses komunikasi di lingkungan pertanian dan pedesaan sesuai dengan kebutuhan wilayah atau kawasan. Partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan agribisnis komoditas tertentu dengan pola OTOP/KPA dapat dikemas secara efisien melalui PIP dengan dukungan kebijakan dan fasilitas pemerintah dan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi yang relevan.

### KESIMPULAN

1. Peran komunikasi pembangunan dalam modernisasi semakin penting seiring dengan kemajuan iptek dan perkembangan globalisasi yang menuntut kemandirian dan daya saing petani, sehingga perlu dukungan penelitian komunikasi pembangunan pertanian yang lebih luas.
2. Dengan kondisi petani yang serba lemah saat ini hanya mungkin dapat membangun agribisnis dan agribisnis yang efektif dan efisien jika bergabung dalam wadah koperasi pertanian yang mempunyai keunggulan dan kemampuan profesional, sehingga perlu penataan KUD agar dapat mewujudkan harapan anggota sesuai dengan prinsip-prinsip perkoparasian..
3. Koperasi pertanian profesional tidak mungkin dikembangkan melalui model KUD yang bersifat *multipurpose*, perlu diarahkan untuk mengembangkan program komoditas unggulan yang terkait dengan usahatani anggota di tiap daerah dalam suatu kawasan pengembangan agribisnis (KPA) komoditas unggulan tertentu dengan memperhatikan pengalaman program OTOP di Thailand dan Jepang.
4. Dalam era globalisasi sekarang ini telah terbentuk masyarakat informasi yang sangat membutuhkan berbagai informasi yang sesuai dengan kebutuhan petani, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan informasi yang tersedia dalam membangun pertanian yang semakin modern menuju kemandirian, daya saing dan kesejahteraan petani melalui pusat informasi pertanian (PIP) dengan melibatkan seluruh *stakeholder* di lingkungan pedesaan.
5. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah perlu koordinasi untuk mendorong akselerasi modernisasi pertanian berkelanjutan berbasis potensi daerah dan koperasi pertanian menuju kemandirian, daya saing dan kesejahteraan petani dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan sebagai amanah konstitusi nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

Adjid DA. 2001. *Membangun Pertanian Modern*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar Tani.

- Dissayanake W. 1981. *Development and Communication Four Approach*. Singapore: Media Asia. The Asian Mass Communication Research and Information Centre (AMIC).
- Jahi A. 1988. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga*. Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia.
- Kossen S. 1993. *Aspek Manusiawi dalam Organisasi*. Edisi Ketiga. Penerjemah Bakti Siregar. Jakarta: Erlangga.
- Rakhmat J. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Cetakan ke-22. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rogers EM. 1976. "Communication and Development: The Passing of the Dominant Paradigm". In, *Communication and Development, Critical Perspective*. London: Sage Publication, Beverly.
- \_\_\_\_\_, Kincaid DL. 1981. *Communication Network: Toward A New Paradigm for Research*. New York: A Division of Mc Millan Publishing Co. Inc.
- Mosher AT. 1985. *Getting Agriculture Moving*.: Frederick A. Prayeger, Inc. Publisher. New York
- Muhammad, A. 2004. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad A. 2004. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana D, Rakhmat J. 2001. *Komunikasi antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sahardi 2005. Buletin BPTP Sulawesi Selatan; Volume I. Nomor I Tahun 2005. Makassar.
- Sembiring EN. Tambunan, AHT. Rangkuti, PA. Nelwan, LO. 2008. Jakarta: Studi Perkuatan Daya Saing Pasar Koperasi. Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah.
- Sinaga P, Aedah S, Subiyantoko A. 2008. *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soekartawi. 1988. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. Jakarta: UI Press.
- Steers RM. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Umar A. 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025*. Jakarta: Citra Utama.